

MISSION ECONOMY DAN KEADILAN SOSIAL

Mengarahkan Inovasi untuk Kesejahteraan Bersama

• Oleh: Rudy C Tarumingkeng •



1. IDE POKOK



Mission Economy menempatkan inovasi bukan sekadar untuk pertumbuhan dan laba, tetapi untuk menyelesaikan tantangan besar masyarakat secara terarah, kolaboratif, dan adil.

2. APA ITU MISSION ECONOMY?



1) Tujuan publik yang jelas target sosial yang spesifik dan terukur.



2) Lintas sektor pemerintah, kampus, industri, UMKM, dan masyarakat bekerja bersama.



3) Berbatas waktu misi memiliki horizon dan indikator hasil.



4) Berorientasi solusi inovasi diarahkan pada masalah nyata.



5) Pembelajaran berkelanjutan eksperimen, evaluasi, dan perbaikan terus dilakukan.

3. DARI MARKET FAILURE KE MARKET SHAPING



A. Negara sebagai korektor hanya memperbaiki kegagalan pasar.



B. Negara sebagai investor awal berani membiayai risiko strategis.



C. Negara sebagai pembentuk pasar mengarahkan arah inovasi.



D. Negara sebagai pencipta nilai publik memastikan manfaat kembali ke masyarakat.



Inovasi besar sering lahir dari dukungan publik, sehingga hasilnya perlu dibagi secara adil.

4. PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM MISI



1) Akses yang inklusif hasil inovasi harus dapat dijangkau semua kelompok.



2) Kesempatan yang merata UMKM, daerah, perempuan, dan kelompok rentan dilibatkan.



3) Risiko dan manfaat dibagi adil publik tidak hanya menanggung risiko.



4) Partisipasi warga masyarakat ikut menentukan arah misi.



5) Nilai publik diutamakan kesejahteraan bersama lebih penting dari laba sempit.

5. PERAN NEGARA KEWIRAUSAHAAN



1. Menetapkan misi nasional



2. Mendanai riset dan inovasi awal



3. Menghubungkan aktor lintas sektor



4. Mengatur agar kompetisi sehat dan akuntabel



5. Menjamin hasil inovasi memperkuat kesejahteraan sosial

6. SIKLUS MISSION-ORIENTED INNOVATION



Tantangan Publik



Perumusan Misi



Investasi & Eksperimen



Kolaborasi



Evaluasi & Pembelajaran



Dampak Sosial

Misi bukan proyek tunggal, tetapi portfolio kebijakan, riset, pembiayaan, dan regulasi.

7. CONTOH MISI STRATEGIS



Energi bersih terjangkau



Kesehatan preventif berbasis data



Pangan bergizi dan berkelanjutan



Pendidikan dan literasi AI untuk semua



UMKM digital naik kelas



Kota sehat dan rendah emisi

9. AGENDA KEBIJAKAN



Pilih beberapa misi nasional yang jelas dan terukur



Bangun kapasitas negara dan lembaga publik



Terapkan syarat nilai publik pada insentif dan subsidi



Gunakan pengadaan publik untuk mendorong inovasi



Lindungi pekerja dan kelompok rentan dalam proses transisi



Perkuat evaluasi, data terbuka, dan akuntabilitas

8. IMPLIKASI BAGI INDONESIA



- 1) Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah nasional dan transfer teknologi.
- 2) Transisi energi perlu adil bagi pekerja dan daerah penghasil fosil.
- 3) Inovasi digital harus memperkuat UMKM dan melindungi data warga.
- 4) Pendidikan, riset, dan kampus perlu diarahkan pada tantangan publik.
- 5) Kebijakan industri harus menyeimbangkan produktivitas, pemerataan, dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Mission Economy mengajak inovasi bergerak dari logika laba semata menuju logika tujuan publik. Inovasi yang diarahkan dengan baik dapat menjadi alat keadilan sosial, daya saing nasional, dan kesejahteraan bersama.



*Rudy C Tarumingkeng: Mission Economy dan Keadilan Sosial:
Mengarahkan Inovasi untuk Kesejahteraan Bersama*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

25 Juni 2026

MISSION ECONOMY DAN KEADILAN SOSIAL: MENGARAHKAN INOVASI UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA

Abstrak

Artikel ini membahas gagasan *Mission Economy* sebagai paradigma baru dalam ekonomi politik inovasi, pembangunan, dan keadilan sosial. Konsep ini terutama dikembangkan oleh Mariana Mazzucato melalui kritiknya terhadap pandangan pasar bebas yang menempatkan negara hanya sebagai pengoreksi kegagalan pasar. Dalam pendekatan *Mission Economy*, negara tidak sekadar memperbaiki pasar setelah terjadi kegagalan, tetapi ikut membentuk arah pasar, menggerakkan inovasi, membangun kapasitas publik, dan mengoordinasikan berbagai aktor untuk menyelesaikan tantangan besar masyarakat. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, kesehatan publik, ketahanan pangan, kemiskinan, ketimpangan digital, energi bersih, pendidikan, perumahan, dan transformasi industri. Artikel ini menempatkan *Mission Economy* dalam kerangka keadilan sosial dengan menekankan bahwa inovasi tidak boleh hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, valuasi perusahaan, atau keuntungan privat, tetapi dari kontribusinya terhadap kesejahteraan bersama. Dengan menggunakan perspektif *mission-oriented innovation policy*, *entrepreneurial state*, *public value*, dan *common good economy*, artikel ini berargumen bahwa inovasi harus diarahkan oleh tujuan publik yang jelas, disertai pembagian risiko

dan manfaat yang adil, serta didukung oleh tata kelola yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, digitalisasi UMKM, pendidikan berbasis AI, kesehatan preventif, ketahanan pangan, ekonomi biru, dan pembangunan daerah. Artikel ini menyimpulkan bahwa masa depan inovasi tidak cukup diarahkan oleh pertanyaan "apa yang bisa dikomersialkan?", tetapi harus menjawab "masalah publik apa yang harus diselesaikan bersama?"

Kata kunci: *Mission Economy, Mariana Mazzucato, inovasi, keadilan sosial, negara kewirausahaan, nilai publik, kebijakan berbasis misi, kesejahteraan bersama, transformasi industri, Indonesia.*

1. Pendahuluan: Ketika Inovasi Harus Memiliki Arah Moral

Dalam ekonomi modern, inovasi sering dipahami sebagai mesin pertumbuhan. Inovasi menghasilkan produk baru, teknologi baru, proses produksi baru, model bisnis baru, dan pasar baru. Inovasi mempercepat produktivitas, memperbesar keuntungan, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memperluas pilihan konsumen. Karena itu, hampir semua negara, perusahaan, universitas, dan lembaga pembangunan berbicara tentang pentingnya inovasi.

Namun, pertanyaan yang lebih mendasar jarang diajukan: inovasi untuk apa, untuk siapa, dan dengan konsekuensi apa? Tidak semua inovasi otomatis meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebagian inovasi memperluas akses kesehatan, pendidikan, pangan, energi, dan informasi. Tetapi sebagian lain justru memperkuat monopoli digital, memperbesar konsumsi berlebihan, menggantikan pekerjaan tanpa perlindungan sosial, mengumpulkan data warga tanpa kontrol publik, atau menciptakan

teknologi yang lebih melayani keuntungan privat daripada kebutuhan masyarakat.

Di sinilah gagasan *Mission Economy* menjadi penting. Mariana Mazzucato mengusulkan agar ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan transaksi pasar, tetapi sebagai proyek kolektif yang dapat diarahkan untuk menyelesaikan tantangan besar masyarakat. Dalam laman resminya, *Mission Economy* dijelaskan sebagai karya yang mengajak kita melihat tantangan besar secara berbeda, yaitu dengan memikirkan ulang kapasitas dan peran pemerintah dalam ekonomi dan masyarakat serta memulihkan kembali rasa tujuan publik (*public purpose*). ([Mariana Mazzucato](#))

Gagasan ini menantang pemikiran ekonomi konvensional yang sering memosisikan negara hanya sebagai pengoreksi kegagalan pasar. Dalam pendekatan lama, pasar dianggap sebagai mekanisme utama pencipta nilai, sedangkan negara hadir ketika pasar gagal: mengatasi eksternalitas, menyediakan barang publik, mengatur monopoli, atau membantu kelompok miskin. Mazzucato tidak menolak fungsi korektif negara, tetapi ia menilai peran itu terlalu sempit. Negara, menurutnya, juga dapat membentuk pasar, menciptakan arah inovasi, membiayai risiko awal, membangun kapasitas produktif, dan memastikan bahwa hasil inovasi dibagikan secara adil.

Pendekatan *mission-oriented innovation policy* kini juga mendapat perhatian luas dalam kebijakan publik internasional. OECD menjelaskan bahwa negara-negara mulai memakai kebijakan inovasi berorientasi misi sebagai strategi untuk menghadapi tantangan sosial yang kompleks, dengan menetapkan tujuan dan kerangka waktu yang jelas, serta menyelaraskan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan regulasi untuk menghasilkan solusi kolaboratif. ([OECD](#)) Uni Eropa, misalnya, mengembangkan *EU Missions* dalam Horizon Europe untuk menghadapi isu perubahan iklim, kanker, restorasi laut, kesehatan tanah, dan kota cerdas-netral iklim. ([Research and innovation](#))

Dengan demikian, *Mission Economy* bukan sekadar teori tentang inovasi. Ia adalah teori tentang arah pembangunan. Ia bertanya: apakah ekonomi hanya dibiarkan bergerak sesuai sinyal harga dan keuntungan, ataukah masyarakat berhak menetapkan misi bersama? Apakah negara cukup menjadi penyedia regulasi minimum, ataukah negara harus membangun kapasitas untuk mengarahkan transformasi? Apakah inovasi cukup dinilai dari paten, ekspor, atau nilai pasar, ataukah harus dinilai dari dampaknya terhadap keadilan sosial?

Artikel ini membahas *Mission Economy* sebagai kerangka untuk menyatukan inovasi dan keadilan sosial. Argumen utamanya adalah bahwa inovasi harus diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Inovasi yang tidak memiliki arah moral dapat memperkuat ketimpangan. Sebaliknya, inovasi yang diarahkan oleh misi publik dapat memperluas kesempatan, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat daya saing nasional, dan memperbaiki hubungan antara negara, pasar, masyarakat, dan alam.

2. Dari Market Failure ke Market Shaping

Dalam teori ekonomi arus utama, negara biasanya diberi peran ketika terjadi *market failure*. Pasar gagal ketika harga tidak mencerminkan biaya sosial, informasi tidak sempurna, barang publik tidak cukup disediakan, atau monopoli menghambat kompetisi. Dalam kerangka ini, negara berperan sebagai korektor. Negara hadir setelah pasar gagal.

Mazzucato mengkritik pandangan ini karena terlalu defensif. Jika negara hanya dipahami sebagai korektor, maka kebijakan publik menjadi reaktif. Negara menunggu pasar bekerja, lalu menambal kerusakan. Negara memperbaiki polusi setelah terjadi, memberi bantuan setelah ketimpangan melebar, menyelamatkan bank setelah krisis, atau membiayai riset dasar tanpa memastikan pembagian manfaatnya.

Pendekatan *market shaping* berbeda. Negara tidak hanya memperbaiki pasar, tetapi ikut membentuk pasar. Pasar energi bersih, kendaraan listrik,

vaksin, internet, ruang angkasa, bioteknologi, dan teknologi digital tidak muncul begitu saja. Pasar-pasar tersebut dibentuk oleh investasi publik, regulasi, standar, riset dasar, pengadaan pemerintah, kebijakan industri, pembiayaan jangka panjang, dan koordinasi lintas aktor.

Mazzucato menunjukkan bahwa mitos “sektor privat selalu inovatif dan negara selalu lamban” tidak sesuai dengan sejarah inovasi. Dalam karya *The Entrepreneurial State*, ia menekankan bahwa banyak inovasi penting terjadi karena negara berani membiayai risiko awal yang terlalu besar bagi sektor swasta. Laman resmi bukunya menjelaskan bahwa dalam berbagai kasus, dari teknologi informasi, bioteknologi, nanoteknologi, hingga teknologi hijau, sektor privat sering berani berinvestasi setelah negara mengambil risiko awal yang besar. ([Mariana Mazzucato](#))

Namun, pengakuan terhadap peran negara saja belum cukup. Pertanyaan keadilan muncul ketika publik menanggung risiko tetapi keuntungan akhirnya diprivatisasi. Jika riset vaksin, energi bersih, kecerdasan buatan, atau teknologi digital mendapat dukungan publik, maka masyarakat berhak memperoleh manfaat publik: harga yang terjangkau, akses yang luas, pekerjaan layak, pajak yang adil, transfer teknologi, dan perlindungan data.

Di sinilah *Mission Economy* bertemu dengan keadilan sosial. Negara bukan hanya perlu membentuk pasar, tetapi harus membentuk pasar dengan tujuan publik. Inovasi tidak boleh hanya diarahkan pada “apa yang menguntungkan”, tetapi pada “apa yang penting bagi kehidupan bersama”. Misi publik harus menjawab kebutuhan masyarakat: pangan bergizi, kesehatan preventif, pendidikan bermutu, energi bersih, transportasi publik, perumahan layak, kota sehat, laut lestari, dan digitalisasi yang inklusif.

3. Makna Mission Economy: Ekonomi sebagai Proyek Kolektif

Mission Economy berangkat dari metafora “moonshot”, yaitu misi pendaratan manusia di bulan. Misi Apollo bukan sekadar proyek teknologi roket. Ia merupakan proyek nasional yang menggabungkan visi politik, sains, industri, universitas, pengadaan publik, koordinasi organisasi, pembiayaan jangka panjang, dan keberanian mengambil risiko. Mazzucato menggunakan contoh ini bukan untuk mengatakan bahwa semua masalah sosial dapat diselesaikan seperti program luar angkasa, melainkan untuk menekankan pentingnya tujuan ambisius yang mampu menggerakkan banyak sektor.

Dalam pendekatan misi, negara menetapkan arah. Tetapi negara tidak bekerja sendirian. Misi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, lembaga riset, perusahaan, koperasi, UMKM, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan warga. Misi bukan instruksi birokratis satu arah, melainkan proses ko-kreasi.

OECD mendefinisikan kebijakan inovasi berorientasi misi sebagai paket kebijakan dan regulasi yang terkoordinasi untuk memobilisasi inovasi dalam rangka mencapai tujuan sosial yang jelas dalam jangka waktu tertentu. ([Observatory of Public Sector Innovation](#)) Definisi ini penting karena misi memiliki beberapa ciri: tujuan jelas, batas waktu, orientasi hasil, koordinasi lintas sektor, pembelajaran berkelanjutan, serta penggabungan kebijakan riset, industri, pembiayaan, regulasi, dan pengadaan.

Sebuah misi berbeda dari slogan pembangunan. “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi” bukan misi yang memadai karena terlalu umum dan tidak menjawab pertanyaan pertumbuhan untuk apa. Sebaliknya, “mengurangi stunting anak hingga tingkat tertentu melalui pangan bergizi, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan ibu, dan sistem data terpadu dalam sepuluh tahun” adalah misi yang lebih konkret. “Menjadikan 100 kota rendah karbon dengan transportasi publik terintegrasi dan kualitas udara sehat pada 2045” juga lebih dekat pada logika misi karena memiliki arah, indikator, aktor, dan jangka waktu.

Misi juga berbeda dari proyek. Proyek biasanya terbatas pada satu institusi, satu anggaran, atau satu output. Misi bersifat lintas sektor dan sistemik. Misalnya, misi “energi bersih terjangkau” tidak hanya memerlukan pembangunan pembangkit energi terbarukan. Ia memerlukan reformasi jaringan listrik, penyimpanan energi, industri komponen, pembiayaan hijau, pelatihan tenaga kerja, riset baterai, tata ruang, reformasi subsidi, perlindungan konsumen miskin, dan transisi bagi pekerja sektor fosil.

Dengan demikian, *Mission Economy* adalah cara berpikir tentang ekonomi sebagai proyek kolektif. Ekonomi tidak sekadar tumbuh; ekonomi diarahkan. Inovasi tidak sekadar muncul; inovasi dibentuk. Negara tidak sekadar membelanjakan anggaran; negara membangun kapasitas. Perusahaan tidak sekadar mengejar laba; perusahaan diajak berkontribusi pada nilai publik. Warga tidak sekadar menjadi konsumen; warga menjadi peserta dalam menentukan tujuan pembangunan.

4. Keadilan Sosial sebagai Inti Misi

Keadilan sosial harus menjadi inti dari *Mission Economy*. Tanpa keadilan sosial, misi publik dapat berubah menjadi proyek teknokratis yang hanya menguntungkan elite. Misi energi bersih dapat menguntungkan perusahaan besar tetapi menaikkan biaya bagi rakyat kecil. Misi digitalisasi dapat memperluas layanan tetapi juga mengeksploitasi data warga. Misi kesehatan dapat menghasilkan teknologi medis canggih tetapi tidak terjangkau bagi kelompok miskin. Misi pendidikan dapat melahirkan platform digital tetapi memperlebar kesenjangan antara sekolah kaya dan miskin.

Keadilan sosial dalam *Mission Economy* mencakup sekurang-kurangnya lima dimensi.

Pertama, keadilan akses. Setiap warga harus dapat menikmati hasil inovasi, terutama dalam layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan,

energi, air, transportasi, dan konektivitas digital. Inovasi yang hanya dapat diakses oleh kelas atas tidak cukup disebut misi publik.

Kedua, keadilan kesempatan. Misi harus membuka peluang bagi aktor yang selama ini terpinggirkan: UMKM, koperasi, petani kecil, nelayan kecil, perempuan, generasi muda, daerah tertinggal, masyarakat adat, pekerja informal, dan penyandang disabilitas.

Ketiga, keadilan distribusi manfaat. Jika negara memberikan subsidi, insentif, kontrak, lisensi, atau dukungan riset kepada perusahaan, maka publik harus memperoleh imbal balik. Imbal balik itu dapat berupa harga terjangkau, royalti, saham publik, pajak adil, kewajiban reinvestasi, transfer teknologi, atau standar kerja layak.

Keempat, keadilan risiko. Dalam banyak kasus, negara dan masyarakat menanggung risiko awal inovasi. Karena itu, tidak adil jika ketika berhasil semua keuntungan hanya dinikmati oleh korporasi. Formula “risiko disosialisasikan, keuntungan diprivatisasi” harus diganti menjadi “risiko dan manfaat dibagi secara adil”.

Kelima, keadilan partisipasi. Masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan misi. Misi publik yang disusun hanya oleh elite teknokrat dan korporasi besar berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Partisipasi warga, akademisi, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku kecil harus menjadi bagian dari tata kelola misi.

Dalam konteks global, keadilan sosial ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals. PBB menyatakan bahwa 17 SDGs merupakan seruan tindakan universal bagi semua negara untuk membangun perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet, kini dan pada masa depan. ([Sustainable Development Goals](#)) UNDP juga menekankan bahwa SDGs bersifat terpadu: tindakan pada satu bidang memengaruhi bidang lain, dan pembangunan harus menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. ([UNDP](#))

Dengan demikian, *Mission Economy* dapat dipahami sebagai cara untuk mengoperasionalkan SDGs secara lebih strategis. SDGs memberi tujuan normatif global, sedangkan pendekatan misi memberi cara mengoordinasikan inovasi, investasi, kebijakan, dan institusi agar tujuan tersebut dapat dicapai.

5. Public Value: Dari Nilai Pasar ke Nilai Publik

Salah satu kontribusi penting Mazzucato adalah kritik terhadap cara ekonomi modern memahami nilai. Dalam ekonomi pasar, nilai sering diidentikkan dengan harga. Sesuatu dianggap bernilai jika memiliki harga pasar tinggi atau menghasilkan laba. Namun, banyak kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan tidak selalu dihargai tinggi oleh pasar: perawatan, pendidikan dasar, kesehatan preventif, kebersihan lingkungan, riset dasar, perlindungan hutan, pekerjaan sosial, dan pelayanan publik.

Sebaliknya, banyak aktivitas yang menghasilkan keuntungan besar belum tentu menciptakan nilai publik. Spekulasi keuangan, monopoli paten, penghindaran pajak, eksploitasi data, komodifikasi layanan dasar, dan bisnis yang merusak lingkungan dapat menghasilkan laba tinggi tetapi tidak selalu memperbesar kesejahteraan bersama.

Mazzucato membedakan *value creation* dan *value extraction*. *Value creation* adalah penciptaan nilai nyata yang memperbesar kapasitas masyarakat. *Value extraction* adalah pengambilan nilai dari sistem tanpa kontribusi produktif sepadan. Dalam ekonomi misi, kebijakan publik harus mampu membedakan keduanya.

Konsep *public value* mengubah cara kita menilai inovasi. Inovasi bukan hanya dinilai dari jumlah paten, startup, ekspor, atau valuasi perusahaan. Inovasi harus dinilai dari apakah ia meningkatkan kesehatan masyarakat, menurunkan emisi, memperkuat pendidikan, memperluas akses energi, menciptakan pekerjaan bermartabat, memperkuat UMKM, mengurangi ketimpangan, dan menjaga alam.

Dalam artikel *Governing the economics of the common good*, Mazzucato mengembangkan gagasan *common good* untuk melampaui pendekatan klasik tentang barang publik dan *commons*, dengan menekankan perlunya ekonomi diarahkan untuk membentuk tujuan kolektif. Artikel tersebut diterbitkan dalam *Journal of Economic Policy Reform* dengan DOI 10.1080/17487870.2023.2280969. ([Taylor & Francis Online](#))

Konsep nilai publik juga mengubah relasi negara dan perusahaan. Kemitraan publik-swasta tidak cukup hanya menyatakan bahwa swasta lebih efisien dan publik menyediakan dana. Kemitraan harus disusun dengan prinsip nilai publik: tujuan jelas, pembagian risiko adil, akuntabilitas terbuka, standar sosial-ekologis, dan imbal balik bagi masyarakat.

Misalnya, jika negara mendukung industri farmasi melalui riset publik, insentif pajak, pengadaan, dan pembiayaan, maka harga obat tidak boleh menjadi tidak terjangkau. Jika negara mendukung industri kendaraan listrik, maka harus ada syarat energi bersih, standar lingkungan tambang, pelatihan pekerja, kandungan lokal yang realistis, dan akses transportasi publik. Jika negara mendukung platform digital, maka harus ada tata kelola data, perlindungan pekerja gig, pajak yang adil, dan dukungan bagi UMKM.

6. Negara Kewirausahaan: Kapasitas Publik untuk Mengambil Risiko

Mission Economy membutuhkan negara yang berkapasitas. Negara tidak cukup memiliki niat baik. Negara harus memiliki kemampuan merancang misi, mengoordinasikan aktor, membiayai inovasi, mengevaluasi hasil, belajar dari kegagalan, dan menjaga akuntabilitas.

Mazzucato menyebut negara seperti ini sebagai *entrepreneurial state*. Negara kewirausahaan bukan negara yang menggantikan semua peran pasar, melainkan negara yang berani mengambil risiko strategis, membangun ekosistem inovasi, dan mengarahkan investasi pada tujuan publik. Dalam artikel *The Entrepreneurial State*, Mazzucato menekankan

bahwa mengabaikan peran kunci negara dalam memajukan inovasi merupakan salah satu kesalahan besar fundamentalisme pasar. ([Lawrence Wishart](#))

Namun, negara kewirausahaan berbeda dari negara birokratis yang hanya menghabiskan anggaran. Negara kewirausahaan memerlukan *dynamic capabilities*: kemampuan mengantisipasi perubahan, mengelola portofolio proyek, berkolaborasi, belajar, dan memperbaiki kebijakan. Kattel dan Mazzucato menekankan bahwa kemampuan dinamis sektor publik merupakan elemen penting dalam kebijakan inovasi berorientasi misi karena tantangan besar masyarakat memerlukan organisasi publik yang mampu belajar dan beradaptasi. ([OUP Academic](#))

Kapasitas publik mencakup beberapa hal. Pertama, kapasitas teknis: kemampuan menganalisis data, merancang kebijakan, memahami teknologi, dan mengukur dampak. Kedua, kapasitas fiskal: kemampuan memobilisasi pajak, belanja publik, pembiayaan campuran, dan investasi jangka panjang. Ketiga, kapasitas regulatif: kemampuan membuat aturan yang mendorong inovasi tetapi mencegah eksploitasi. Keempat, kapasitas koordinatif: kemampuan menyatukan kementerian, daerah, universitas, BUMN, swasta, dan masyarakat. Kelima, kapasitas demokratis: kemampuan melibatkan warga, mendengar kelompok rentan, dan bertanggung jawab secara terbuka.

Kelemahan negara tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerahkan semuanya kepada pasar. Sebaliknya, kelemahan negara harus menjadi alasan untuk membangun kapasitas negara. Jika negara tidak memiliki kapasitas, maka proyek misi dapat gagal, dikorupsi, dikooptasi, atau berubah menjadi proyek rente. Karena itu, *Mission Economy* menuntut reformasi birokrasi yang lebih dalam: bukan hanya efisiensi administratif, tetapi kemampuan strategis untuk membentuk masa depan.

7. Misi, Inovasi, dan Demokrasi

Sebuah misi publik harus demokratis. Jika tidak, misi dapat berubah menjadi proyek top-down yang memaksakan visi elite kepada masyarakat. Demokrasi dalam misi memiliki dua arti. Pertama, masyarakat ikut menentukan masalah apa yang dianggap penting. Kedua, masyarakat ikut mengawasi bagaimana misi dijalankan.

Contoh sederhana dapat dilihat pada misi kota sehat. Pemerintah dapat mendefinisikan kota sehat sebagai pembangunan rumah sakit modern dan aplikasi kesehatan digital. Namun, warga miskin mungkin lebih membutuhkan air bersih, sanitasi, udara bersih, transportasi publik, ruang hijau, makanan sehat, dan klinik primer yang dekat. Tanpa partisipasi, misi kesehatan dapat terlalu teknologis dan kurang menyentuh akar masalah.

Demokrasi juga penting untuk menjaga akuntabilitas perusahaan. Jika perusahaan menerima kontrak publik dalam misi digitalisasi pendidikan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana data siswa digunakan, apakah algoritma adil, apakah konten berkualitas, apakah guru dilibatkan, dan apakah sekolah miskin mendapat manfaat. Jika perusahaan menerima insentif industri hijau, publik berhak mengetahui dampak lingkungan, standar pekerja, dan kontribusi pajaknya.

Misi yang demokratis harus memiliki ruang deliberasi: forum warga, konsultasi publik, keterlibatan akademisi, transparansi data, audit sosial, dan evaluasi independen. Dalam hal ini, demokrasi bukan penghambat inovasi, melainkan penjamin legitimasi inovasi.

8. Pembiayaan Misi: Dari Subsidi Pasif ke Investasi Publik Strategis

Tidak ada misi besar tanpa pembiayaan. Namun, pembiayaan misi tidak boleh sekadar berupa subsidi pasif. Subsidi pasif terjadi ketika negara memberi insentif kepada perusahaan tanpa arah, tanpa syarat, dan tanpa

evaluasi hasil. Dalam pendekatan misi, pembiayaan harus strategis, bersyarat, dan berorientasi hasil.

Mazzucato dan Semieniuk dalam artikel tentang pembiayaan energi terbarukan menunjukkan pentingnya memahami siapa membiayai apa dan mengapa hal itu penting. Artikel tersebut diterbitkan dalam *Technological Forecasting and Social Change* dengan DOI 10.1016/j.techfore.2017.05.021. ([IDEAS/RePEc](#)) Temuan seperti ini relevan karena transisi energi tidak hanya membutuhkan jumlah dana besar, tetapi juga jenis pembiayaan yang sabar, berani mengambil risiko, dan berorientasi jangka panjang.

Pembiayaan misi dapat menggunakan beberapa instrumen: hibah riset, pengadaan publik, pinjaman lunak, jaminan kredit, dana abadi, bank pembangunan, obligasi hijau, dana inovasi, insentif pajak bersyarat, pembiayaan campuran, dan investasi ekuitas publik. Namun, setiap instrumen harus dikaitkan dengan tujuan publik.

Prinsip utama pembiayaan misi adalah *conditionality*. Perusahaan yang menerima dukungan negara harus memenuhi syarat. Syarat itu dapat berupa kewajiban harga terjangkau, transfer teknologi, standar lingkungan, upah layak, pelatihan pekerja, penggunaan pemasok lokal yang kompetitif, pembagian data untuk kepentingan publik, atau reinvestasi laba. Tanpa syarat, pembiayaan publik dapat berubah menjadi hadiah bagi modal besar.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sangat penting. Insentif hilirisasi, kendaraan listrik, energi terbarukan, digitalisasi, dan kawasan industri harus disertai indikator nilai publik. Pertanyaannya bukan hanya berapa investasi masuk, tetapi apakah investasi itu meningkatkan kapasitas nasional, memperkuat SDM, mengurangi emisi, melindungi pekerja, dan memberi manfaat kepada daerah.

9. Kritik terhadap Mission Economy: Risiko Negara Gagal dan Bahaya Sloganisme

Pendekatan *Mission Economy* tidak bebas dari kritik. Kritik pertama adalah risiko *government failure*. Negara dapat salah memilih misi, salah memilih teknologi, membuang anggaran, terjebak proyek mercusuar, atau menjadi alat kepentingan politik jangka pendek. Kritik ini penting karena sejarah pembangunan menunjukkan banyak proyek negara yang gagal, boros, atau korup.

Kritik kedua adalah risiko *regulatory capture*. Misi publik dapat dikooptasi oleh korporasi besar. Perusahaan dapat menggunakan bahasa misi untuk memperoleh subsidi, kontrak, atau proteksi tanpa benar-benar menciptakan nilai publik. Dalam kasus seperti ini, *Mission Economy* berubah menjadi kapitalisme rente dengan bahasa progresif.

Kritik ketiga adalah risiko sloganisme. Banyak pemerintah dapat menyebut programnya sebagai "misi" tanpa memenuhi ciri misi yang sebenarnya. Jika semua tujuan disebut misi, maka konsep misi kehilangan makna. Misi harus konkret, terukur, lintas sektor, berbatas waktu, dan memiliki tata kelola yang jelas.

Kritik keempat adalah risiko teknokratisme. Pemerintah dapat merancang misi secara terlalu elitis, seolah-olah masalah sosial dapat diselesaikan hanya dengan teknologi dan ahli. Padahal, masalah seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, energi, dan iklim berkaitan dengan kekuasaan, distribusi, budaya, dan perilaku sosial.

Karena itu, *Mission Economy* harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian institusional. Negara harus berani, tetapi tidak boleh sembrono. Negara harus aktif, tetapi tetap akuntabel. Negara harus menetapkan arah, tetapi tidak menutup ruang eksperimen. Negara harus bekerja sama dengan swasta, tetapi tidak tunduk pada swasta. Negara harus memakai teknologi, tetapi tidak mengabaikan manusia.

OECD dalam laporan 2024 tentang kebijakan inovasi berorientasi misi untuk net zero menekankan bahwa MOIP memerlukan orientasi strategis, koordinasi, tindakan, serta perangkat pemantauan dan evaluasi agar misi tidak berhenti pada desain tetapi benar-benar dapat diimplementasikan. ([OECD](#))

10. Mission Economy dan SDGs: Dari Daftar Tujuan ke Mesin Transformasi

SDGs menyediakan peta moral global: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih, pekerjaan layak, industri dan inovasi, pengurangan ketimpangan, kota berkelanjutan, konsumsi-produksi bertanggung jawab, aksi iklim, perlindungan laut, perlindungan daratan, institusi kuat, dan kemitraan global. Namun, SDGs sering menghadapi masalah implementasi: terlalu luas, terlalu banyak indikator, terlalu sektoral, dan terlalu bergantung pada laporan administratif.

Pendekatan misi dapat membantu menjembatani SDGs dengan strategi implementasi. Misalnya, sebuah negara tidak cukup mengatakan ingin mencapai SDG 3 tentang kesehatan. Negara dapat merumuskan misi: “menurunkan kematian ibu dan bayi secara drastis melalui layanan kesehatan primer, nutrisi, transportasi darurat, data digital, pendidikan perempuan, dan pembiayaan kesehatan berbasis komunitas dalam sepuluh tahun.” Misi ini menghubungkan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, teknologi, data, dan perlindungan sosial.

Demikian pula, SDG 7 tentang energi bersih dapat diterjemahkan menjadi misi: “mewujudkan energi bersih terjangkau bagi desa dan pulau kecil melalui microgrid, tenaga surya, pelatihan teknisi lokal, pembiayaan koperasi, dan regulasi tarif yang adil.” SDG 11 tentang kota berkelanjutan dapat diterjemahkan menjadi misi: “membangun kota dengan transportasi

publik terintegrasi, kualitas udara sehat, ruang hijau, dan perumahan terjangkau.”

Dengan demikian, misi adalah cara untuk membuat SDGs lebih operasional. Misi membantu mengubah tujuan normatif menjadi portofolio kebijakan, investasi, aktor, indikator, dan pembelajaran.

11. Contoh Internasional: EU Missions sebagai Laboratorium Kebijakan

Uni Eropa memberikan salah satu contoh paling eksplisit dari pendekatan misi. Dalam Horizon Europe, *EU Missions* dirancang sebagai inisiatif berskala besar dengan tujuan jelas dan berbatas waktu untuk menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, kanker, restorasi laut, tanah sehat, dan kota netral iklim. Komisi Eropa menyatakan bahwa misi-misi tersebut menyatukan peneliti, pembuat kebijakan, warga, dan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan sumber daya dan menghasilkan solusi konkret bagi manfaat sosial. ([Research and innovation](#))

Ada lima misi utama Uni Eropa: adaptasi terhadap perubahan iklim, kanker, restorasi laut dan perairan, kota cerdas-netral iklim, serta kesehatan tanah dan pangan. ([trami5missions.eu](#)) Hal penting dari contoh ini bukan bahwa Indonesia harus meniru Uni Eropa secara langsung, melainkan bahwa masalah besar membutuhkan pendekatan lintas sektor. Kanker bukan hanya masalah rumah sakit; ia menyangkut pencegahan, riset, data, gaya hidup, lingkungan, obat, pembiayaan, dan sistem kesehatan. Kota netral iklim bukan hanya masalah teknologi energi; ia menyangkut transportasi, bangunan, tata ruang, perilaku warga, pembiayaan, dan pemerintahan kota.

Pelajaran lain dari EU Missions adalah pentingnya tata kelola. Misi tidak cukup disusun di atas kertas. Ia membutuhkan indikator, anggaran, portofolio proyek, mekanisme koordinasi, keterlibatan warga, pembelajaran, dan evaluasi. Tanpa itu, misi mudah menjadi label baru untuk program lama.

12. Relevansi bagi Indonesia: Mengapa Indonesia Membutuhkan Ekonomi Berbasis Misi

Indonesia menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Tantangan itu tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian, satu perusahaan, satu universitas, atau satu daerah. Ketahanan pangan terkait dengan pertanian, air, iklim, logistik, harga, gizi, lahan, teknologi, dan perilaku konsumsi. Transisi energi terkait dengan batu bara, listrik, industri, tarif, investasi, teknologi, pekerja, daerah penghasil, dan emisi. Digitalisasi terkait dengan data, infrastruktur, pendidikan, UMKM, keamanan siber, platform, dan AI. Kesehatan terkait dengan pangan, lingkungan, perilaku, layanan primer, rumah sakit, farmasi, data, dan pembiayaan.

Karena itu, Indonesia membutuhkan pendekatan misi. Beberapa misi nasional yang dapat dipertimbangkan antara lain:

Pertama, misi pangan bergizi dan berkelanjutan. Tujuannya bukan sekadar produksi pangan, tetapi pangan sehat, bergizi, terjangkau, dan ekologis. Misi ini mencakup petani kecil, irigasi, benih, logistik dingin, diversifikasi pangan lokal, teknologi pertanian, gizi anak, koperasi, dan sistem data.

Kedua, misi energi bersih terjangkau. Indonesia perlu mempercepat energi terbarukan sambil menjaga keterjangkauan energi bagi rumah tangga miskin dan industri kecil. Misi ini mencakup PLTS atap, microgrid pulau kecil, panas bumi, transmisi, penyimpanan energi, industri komponen, dan transisi pekerja batu bara.

Ketiga, misi kesehatan preventif berbasis komunitas dan data. Sistem kesehatan masa depan tidak boleh hanya berpusat pada rumah sakit, tetapi pada pencegahan. Misi ini mencakup layanan primer, nutrisi, sanitasi, skrining penyakit, data kesehatan, telemedicine, pendidikan kesehatan, dan produksi alat kesehatan nasional.

Keempat, misi pendidikan AI untuk semua. AI tidak boleh hanya menjadi alat elite. Misi ini mencakup literasi AI, pelatihan guru, kurikulum etika digital, platform pembelajaran terbuka, akses internet sekolah, perlindungan data siswa, dan riset AI Indonesia.

Kelima, misi UMKM naik kelas dalam ekonomi digital. Digitalisasi UMKM tidak cukup berarti masuk marketplace. UMKM perlu akses pembiayaan, logistik, desain produk, data pasar, pembayaran digital, pelatihan, perlindungan dari ketergantungan platform, dan koperasi digital.

Keenam, misi kota sehat dan rendah emisi. Kota Indonesia membutuhkan transportasi publik, ruang hijau, kualitas udara, pengelolaan sampah, perumahan layak, drainase ekologis, dan tata ruang yang manusiawi.

Ketujuh, misi ekonomi biru berkeadilan. Laut Indonesia harus menjadi sumber pangan, energi, pariwisata, karbon biru, dan biodiversitas yang dikelola untuk nelayan kecil, masyarakat pesisir, dan generasi mendatang.

Misi-misi tersebut tidak boleh menjadi daftar keinginan. Masing-masing harus memiliki target, indikator, aktor, anggaran, tata kelola, dan mekanisme evaluasi.

13. Hilirisasi sebagai Misi: Dari Nilai Tambah ke Keadilan Tambah

Indonesia sedang mendorong hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral seperti nikel. Dalam kerangka *Mission Economy*, hilirisasi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai larangan ekspor bahan mentah atau pembangunan smelter. Hilirisasi harus menjadi misi transformasi produktif nasional.

Misi hilirisasi yang adil harus menjawab beberapa pertanyaan. Apakah nilai tambah tinggal di Indonesia? Apakah terjadi transfer teknologi? Apakah tenaga kerja Indonesia meningkat keterampilannya? Apakah universitas dan lembaga riset terlibat? Apakah lingkungan dilindungi? Apakah daerah

penghasil memperoleh manfaat? Apakah UMKM masuk rantai pasok? Apakah pekerja dilindungi? Apakah energi yang dipakai rendah karbon?

Jika pertanyaan itu tidak dijawab, hilirisasi dapat berubah menjadi ekstraktivisme baru. Indonesia mungkin mengeksport produk yang lebih tinggi nilainya, tetapi tetap tidak menguasai teknologi, merek, desain, dan pembiayaan. Dalam situasi itu, Indonesia hanya naik sedikit dalam rantai nilai tetapi belum menjadi pusat inovasi.

Hilirisasi sebagai misi harus menggabungkan industri, riset, pendidikan vokasi, standar lingkungan, pembiayaan, teknologi bersih, dan distribusi manfaat. Negara dapat memberikan insentif, tetapi harus bersyarat. Perusahaan yang mendapat fasilitas harus berkomitmen pada pelatihan, transfer teknologi, audit lingkungan, penggunaan energi lebih bersih, dan keterlibatan pemasok lokal.

Inilah makna “keadilan tambah”: bukan hanya nilai tambah ekonomi, tetapi nilai tambah sosial, ekologis, dan institusional.

14. Digitalisasi sebagai Misi Keadilan

Digitalisasi sering dipahami sebagai modernisasi layanan dan efisiensi bisnis. Namun, digitalisasi juga dapat memperbesar ketimpangan. Mereka yang memiliki akses internet, perangkat, literasi, dan data akan maju lebih cepat. Mereka yang tertinggal akan semakin sulit bersaing. Platform digital dapat membantu UMKM, tetapi juga dapat membuat UMKM tergantung pada algoritma, komisi, dan aturan sepihak.

Dalam kerangka misi, digitalisasi harus diarahkan untuk keadilan sosial. Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak transaksi digital, tetapi apakah digitalisasi memperluas kesempatan. Apakah petani mendapat harga lebih baik? Apakah nelayan mendapat informasi cuaca dan pasar? Apakah siswa desa mendapat akses pembelajaran berkualitas? Apakah pasien daerah

mendapat layanan kesehatan jarak jauh? Apakah UMKM memperoleh data yang berguna? Apakah pekerja platform terlindungi?

Misi digital berkeadilan harus mencakup infrastruktur, literasi, regulasi data, keamanan siber, kompetisi platform, perlindungan konsumen, dan penguatan kapasitas lokal. Data warga harus diperlakukan sebagai aset sosial yang perlu dilindungi, bukan sekadar bahan baku keuntungan platform.

AI juga harus ditempatkan dalam kerangka misi. AI untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, iklim, dan pelayanan publik dapat sangat bermanfaat. Namun, AI juga dapat menciptakan bias, pengawasan berlebihan, pengangguran, dan konsentrasi kekuasaan. Karena itu, misi AI nasional harus menggabungkan inovasi dengan etika, inklusi, transparansi, dan perlindungan hak warga.

15. Pendidikan Tinggi dan Riset dalam Mission Economy

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam *Mission Economy*. Universitas bukan hanya tempat menghasilkan gelar, tetapi pusat pengetahuan, riset, kritik sosial, inovasi, dan pembentukan warga. Dalam ekonomi berbasis misi, universitas harus terhubung dengan tantangan publik.

Namun, hubungan universitas dengan misi tidak boleh direduksi menjadi komersialisasi riset. Universitas harus tetap menjaga kebebasan akademik dan kemampuan kritis. Misi publik justru membutuhkan ilmu yang independen, lintas disiplin, dan berorientasi jangka panjang.

Perguruan tinggi dapat berperan dalam beberapa hal. Pertama, menghasilkan riset dasar dan terapan untuk misi nasional. Kedua, mendidik SDM yang mampu bekerja lintas bidang. Ketiga, menjadi laboratorium kebijakan dan inovasi sosial. Keempat, membantu evaluasi independen

terhadap kebijakan misi. Kelima, membangun kemitraan dengan daerah, UMKM, sekolah, rumah sakit, industri, dan komunitas.

Misalnya, misi pangan berkelanjutan membutuhkan fakultas pertanian, ekonomi, kesehatan masyarakat, teknik, data science, hukum, sosiologi, dan manajemen. Misi energi bersih membutuhkan teknik elektro, geologi, lingkungan, ekonomi, kebijakan publik, dan pendidikan vokasi. Misi kesehatan preventif membutuhkan kedokteran, kesehatan masyarakat, teknologi informasi, nutrisi, perilaku konsumen, dan manajemen rumah sakit.

Dengan demikian, *Mission Economy* menuntut universitas keluar dari silo disiplin. Tantangan publik tidak mengenal batas fakultas.

16. Tata Kelola Misi: Portofolio, Eksperimen, dan Evaluasi

Misi tidak dapat dijalankan seperti proyek birokratis linear. Tantangan sosial bersifat kompleks dan penuh ketidakpastian. Karena itu, tata kelola misi harus berbasis portofolio dan pembelajaran.

Portofolio berarti satu misi terdiri dari banyak eksperimen dan proyek yang saling melengkapi. Misalnya, misi mengurangi stunting tidak hanya satu program bantuan pangan. Ia mencakup air bersih, sanitasi, edukasi ibu, layanan kesehatan primer, pangan lokal, data anak, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Beberapa intervensi akan berhasil, beberapa perlu diperbaiki, beberapa harus dihentikan.

Eksperimen berarti pemerintah tidak harus mengetahui semua jawaban sejak awal. Yang penting adalah kemampuan belajar. Kebijakan diuji, data dikumpulkan, hasil dievaluasi, dan strategi diperbaiki. Kegagalan bukan alasan untuk berhenti, tetapi bahan pembelajaran, selama ada transparansi dan akuntabilitas.

Evaluasi misi harus berbeda dari evaluasi proyek biasa. Evaluasi tidak cukup hanya menilai serapan anggaran atau output administratif. Evaluasi harus

menilai perubahan sistem: apakah emisi turun, apakah kesehatan membaik, apakah UMKM naik kelas, apakah pekerja terlindungi, apakah ketimpangan menurun, apakah kapasitas nasional meningkat.

OECD menyediakan *online toolkit* untuk membantu pembuat kebijakan merancang, mengatur, dan mengimplementasikan kebijakan inovasi berorientasi misi. ([STIP Compass](#)) Ini menunjukkan bahwa misi bukan hanya gagasan normatif, tetapi membutuhkan perangkat praktis: desain, tata kelola, pemangku kepentingan, pendanaan, pemantauan, dan evaluasi.

17. Etika Mission Economy: Menghindari Misi yang Salah

Tidak semua misi baik. Sebuah misi dapat diarahkan untuk tujuan yang keliru, misalnya memperkuat pengawasan warga, memperbesar kekuatan militer tanpa kontrol demokratis, atau mengejar pertumbuhan industri yang merusak lingkungan. Karena itu, *Mission Economy* membutuhkan etika.

Etika misi harus menjawab beberapa pertanyaan. Apakah misi tersebut meningkatkan martabat manusia? Apakah misi melindungi kelompok rentan? Apakah misi menjaga alam? Apakah misi memperluas demokrasi? Apakah misi membagi manfaat secara adil? Apakah misi menghormati hak warga? Apakah misi dapat dipertanggungjawabkan?

Misi yang baik harus memenuhi empat kriteria. Pertama, *public purpose*: tujuan publiknya jelas. Kedua, *inclusiveness*: kelompok terdampak dilibatkan. Ketiga, *sustainability*: dampak ekologis diperhitungkan. Keempat, *accountability*: pelaksanaan dan hasilnya dapat diawasi.

Tanpa etika, misi dapat menjadi alat kekuasaan. Dengan etika, misi menjadi instrumen transformasi sosial.

18. Kerangka Kebijakan untuk Indonesia

Untuk menerapkan *Mission Economy* di Indonesia, diperlukan kerangka kebijakan yang sistematis.

Pertama, pilih misi nasional yang terbatas tetapi strategis. Terlalu banyak misi akan membuat fokus hilang. Indonesia perlu memilih beberapa misi prioritas yang benar-benar lintas sektor, seperti pangan bergizi, energi bersih, kesehatan preventif, pendidikan AI, UMKM digital, kota rendah emisi, dan ekonomi biru.

Kedua, bentuk dewan misi lintas kementerian dan lintas aktor. Dewan ini harus melibatkan pemerintah pusat, daerah, universitas, BUMN, swasta, koperasi, UMKM, masyarakat sipil, dan komunitas terdampak.

Ketiga, tetapkan target yang jelas dan berbatas waktu. Target harus cukup ambisius tetapi realistis. Target harus mengukur hasil, bukan sekadar input.

Keempat, bangun portofolio kebijakan. Setiap misi harus memiliki kombinasi riset, pendidikan, industri, pembiayaan, regulasi, pengadaan publik, dan perlindungan sosial.

Kelima, gunakan pengadaan publik sebagai instrumen inovasi. Pemerintah adalah pembeli besar. Pengadaan dapat diarahkan untuk produk sehat, energi bersih, teknologi lokal, dan layanan publik berkualitas.

Keenam, terapkan syarat publik pada insentif. Setiap subsidi, tax holiday, konsesi, atau dukungan negara harus disertai kewajiban nilai publik.

Ketujuh, bangun sistem data terbuka dan evaluasi independen. Publik harus dapat melihat kemajuan misi, penggunaan anggaran, dampak sosial, dan dampak ekologis.

Kedelapan, lindungi kelompok rentan. Setiap misi harus memiliki komponen keadilan sosial: akses, perlindungan pekerja, pelatihan, harga terjangkau, dan partisipasi.

Kesembilan, perkuat kapasitas birokrasi. Negara harus memiliki analis kebijakan, ahli data, ahli teknologi, manajer portofolio, negosiator kontrak, dan evaluator publik.

Kesepuluh, jadikan misi sebagai gerakan nasional pembelajaran. Misi bukan hanya program pemerintah, tetapi proses bersama yang melibatkan sekolah, kampus, komunitas, industri, media, dan warga.

19. Penutup: Inovasi sebagai Jalan Keadilan

Mission Economy mengajak kita mengubah pertanyaan dasar pembangunan. Bukan lagi hanya “bagaimana ekonomi tumbuh?”, tetapi “untuk tujuan apa ekonomi diarahkan?” Bukan hanya “bagaimana inovasi dikomersialkan?”, tetapi “masalah publik apa yang diselesaikan?” Bukan hanya “berapa besar investasi masuk?”, tetapi “nilai publik apa yang tercipta?” Bukan hanya “berapa banyak teknologi baru?”, tetapi “siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko?”

Keadilan sosial harus menjadi pusat inovasi. Tanpa keadilan, inovasi dapat memperkuat ketimpangan. Tanpa arah publik, inovasi dapat melayani kebutuhan sempit pasar dan mengabaikan kebutuhan luas masyarakat. Tanpa negara berkapasitas, inovasi strategis sulit berkembang. Tanpa partisipasi warga, misi publik dapat kehilangan legitimasi.

Bagi Indonesia, *Mission Economy* menawarkan cara berpikir yang sangat relevan. Negara besar dengan sumber daya besar, populasi besar, tantangan sosial besar, dan peluang teknologi besar membutuhkan strategi pembangunan yang lebih dari sekadar deregulasi dan investasi. Indonesia membutuhkan misi bersama: pangan bergizi, energi bersih, pendidikan AI, kesehatan preventif, UMKM digital, kota manusiawi, laut lestari, dan hilirisasi berkeadilan.

Pada akhirnya, inovasi terbesar bukan hanya penemuan teknologi baru, tetapi kemampuan masyarakat mengarahkan teknologi untuk tujuan

manusiawi. Ekonomi misi adalah undangan untuk membangun kembali hubungan antara negara, pasar, ilmu pengetahuan, masyarakat, dan alam. Kesejahteraan bersama tidak akan lahir dari inovasi yang berjalan tanpa arah. Ia lahir dari inovasi yang dipandu oleh keadilan, dibiayai dengan keberanian publik, dijalankan dengan akuntabilitas, dan dibagikan manfaatnya kepada seluruh masyarakat.

Glossarium

Akuntabilitas publik

Kewajiban lembaga publik dan mitra swasta untuk mempertanggungjawabkan keputusan, penggunaan sumber daya, dan dampak kebijakan kepada masyarakat.

Conditionality

Syarat yang melekat pada dukungan publik, seperti subsidi, insentif, kontrak, atau pembiayaan, agar penerima dukungan menghasilkan nilai publik.

Dynamic capabilities

Kemampuan organisasi, termasuk negara, untuk belajar, beradaptasi, mengoordinasikan sumber daya, dan merespons perubahan kompleks.

Entrepreneurial state

Konsep negara kewirausahaan yang berani mengambil risiko strategis, membiayai inovasi awal, dan membentuk pasar untuk tujuan publik.

Keadilan akses

Prinsip bahwa hasil inovasi, layanan publik, dan peluang ekonomi harus dapat dijangkau oleh seluruh kelompok masyarakat.

Keadilan distribusi

Prinsip bahwa manfaat dan beban pembangunan harus dibagi secara adil, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat terdampak.

Kebijakan berbasis misi

Kebijakan yang menetapkan tujuan publik yang jelas, ambisius, terukur, dan terbatas waktu untuk menggerakkan inovasi lintas sektor.

Market failure

Kondisi ketika pasar gagal menghasilkan hasil yang efisien atau adil, misalnya karena eksternalitas, monopoli, asimetri informasi, atau barang publik.

Market shaping

Peran negara dan institusi publik dalam membentuk arah pasar, bukan hanya memperbaiki kegagalan pasar.

Mission Economy

Paradigma ekonomi yang mengarahkan inovasi, investasi, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan tantangan besar masyarakat.

Mission-oriented innovation policy

Kebijakan inovasi yang berorientasi pada misi sosial tertentu, seperti energi bersih, kesehatan publik, pangan berkelanjutan, atau kota rendah emisi.

Nilai publik / public value

Nilai yang diukur dari manfaat sosial, ekologis, demokratis, dan kesejahteraan kolektif, bukan hanya dari harga pasar atau laba privat.

Portofolio misi

Kumpulan program, eksperimen, proyek, investasi, dan regulasi yang saling mendukung untuk mencapai tujuan misi.

Predistribusi

Upaya membangun keadilan sejak proses penciptaan nilai, bukan hanya melakukan redistribusi setelah ketimpangan terjadi.

Public purpose

Tujuan publik yang memberi arah moral dan sosial bagi kebijakan, inovasi, dan investasi.

Regulatory capture

Kondisi ketika regulator atau kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan kelompok yang seharusnya diawasi.

Risk-reward sharing

Prinsip bahwa risiko dan hasil dari inovasi yang didukung publik harus dibagi secara adil antara negara, swasta, dan masyarakat.

SDGs

Sustainable Development Goals, yaitu 17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang mencakup agenda sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola.

Value creation

Penciptaan nilai nyata yang meningkatkan kapasitas produktif, sosial, ekologis, dan kesejahteraan masyarakat.

Value extraction

Pengambilan nilai dari ekonomi tanpa kontribusi produktif atau sosial yang sepadan.

Daftar Pustaka

Format APA 7. DOI dicantumkan apabila tersedia; beberapa buku dan laporan institusional tidak memiliki DOI.

Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). *Power and progress: Our thousand-year struggle over technology and prosperity*. PublicAffairs. DOI tidak tersedia.

Boon, W., & Edler, J. (2018). Demand, challenges, and innovation: Making sense of new trends in innovation policy. *Science and Public Policy*, 45(4), 435–447. doi: 10.1093/scipol/scy014

Edler, J., & Fagerberg, J. (2017). Innovation policy: What, why, and how. *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), 2–23. doi: 10.1093/oxrep/grx001

Foray, D., Mowery, D. C., & Nelson, R. R. (2012). Public R&D and social challenges: What lessons from mission R&D programs? *Research Policy*, 41(10), 1697–1702. doi: 10.1016/j.respol.2012.07.011

Freeman, C. (1995). The “National System of Innovation” in historical perspective. *Cambridge Journal of Economics*, 19(1), 5–24. doi: 10.1093/oxfordjournals.cje.a035309

Kattel, R., & Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policy and dynamic capabilities in the public sector. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 787–801. doi: 10.1093/icc/dty032

Larrue, P. (2021). *The design and implementation of mission-oriented innovation policies: A new systemic policy approach to address societal challenges*. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 100. doi: 10.1787/3f6c76a4-en

Mazzucato, M. (2011). The entrepreneurial state. *Soundings*, 2011(49), 131–142. doi: 10.3898/136266211798411183

Mazzucato, M. (2013). *The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths*. Anthem Press. DOI tidak tersedia.

Mazzucato, M. (2017). Mission-oriented innovation policy: Challenges and opportunities. UCL Institute for Innovation and Public Purpose Working Paper. DOI tidak tersedia.

Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815. doi: 10.1093/icc/dty034

- Mazzucato, M. (2018). *The value of everything: Making and taking in the global economy*. PublicAffairs. DOI tidak tersedia.
- Mazzucato, M. (2021). *Mission economy: A moonshot guide to changing capitalism*. Harper Business. DOI tidak tersedia.
- Mazzucato, M. (2024). Governing the economics of the common good: From correcting market failures to shaping collective goals. *Journal of Economic Policy Reform*, 27(1), 1–24. doi: 10.1080/17487870.2023.2280969
- Mazzucato, M., & Kattel, R. (2020). COVID-19 and public-sector capacity. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(Supplement_1), S256–S269. doi: 10.1093/oxrep/graa031
- Mazzucato, M., Kattel, R., & Ryan-Collins, J. (2020). Challenge-driven innovation policy: Towards a new policy toolkit. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 20, 421–437. doi: 10.1007/s10842-019-00329-w
- Mazzucato, M., & Penna, C. C. R. (2016). Beyond market failures: The market creating and shaping roles of state investment banks. *Journal of Economic Policy Reform*, 19(4), 305–326. doi: 10.1080/17487870.2016.1216416
- Mazzucato, M., & Semieniuk, G. (2018). Financing renewable energy: Who is financing what and why it matters. *Technological Forecasting and Social Change*, 127, 8–22. doi: 10.1016/j.techfore.2017.05.021
- Nelson, R. R. (2011). The moon and the ghetto revisited. *Science and Public Policy*, 38(9), 681–690. doi: 10.3152/030234211X13070021633320
- OECD. (2024). *Mission-oriented innovation policies for net zero: How can countries implement missions to achieve climate targets?* OECD Publishing. doi: 10.1787/5efdbc5c-en
- Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672. doi: 10.1257/aer.100.3.641

Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Beacon Press. Original work published 1944. DOI tidak tersedia.

Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist*. Chelsea Green Publishing. DOI tidak tersedia.

Rodrik, D. (2014). Green industrial policy. *Oxford Review of Economic Policy*, 30(3), 469–491. doi: 10.1093/oxrep/gru025

Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation, and transformative change. *Research Policy*, 47(9), 1554–1567. doi: 10.1016/j.respol.2018.08.011

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf. DOI tidak tersedia.

Stiglitz, J. E. (2002). Information and the change in the paradigm in economics. *American Economic Review*, 92(3), 460–501. doi: 10.1257/00028280260136363

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations. DOI tidak tersedia.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 25 June 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a3c7e57-42bc-83ec-b637-b98bfb664148>